

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DAN
PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI PULAU MANTEHAGE
KAB. MINAHASA UTARA**

Alfy B. W. Aring¹, Tri Oldy Rotinsulu², Dennij Mandej³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : alviaring27@gmail.com

ABSTRAK

Peranan badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa di Pulau Mantehage hanya ada dalam tiga desa yaitu desa Buhias, Bango dan Tinongko, Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan ekonomi, pendapatan asli desa dan cara pengelolaan badan usaha milik/ desa di pulau mantehage. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2023. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pengelolaan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan badan usaha milik desa di pulau mantehage tidak berjalan begitu baik dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di pulau mantehage serta tidak menghasilkan pendapatan asli desa sesuai rencana pemerintah setempat. Saran untuk pemerintah desa, pengurus bumdes dan masyarakat setempat agar bisa lebih bekerja sama dalam menjalankan badan usaha milik desa ini apalagi potensi-potensi desa yang berada di pulau mantehage sangat banyak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kata kunci : Usaha Desa; Pendapatan Desa; Pengelolaan Pemerintah; Ekonomi Masyarakat

ABSTRACT

The role of village-owned enterprises in increasing the economy and village's original income on Mantehage Island only exists in three villages, namely Buhias, Bango and Tinongko villages. The purpose of this research is to find out economic development, village original income and how to manage village-owned business entities on Mantehage Island. This type of research is a qualitative descriptive research, this research was conducted in June and July 2023. The data sources used were primary data and secondary data. Furthermore, the data collection method used is observation, documentation, and interviews. Data management and analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that the management of village government and community participation in running village-owned enterprises on Mantehage Island is not going very well and does not affect the income of the people on Mantehage Island and does not generate village original income according to the local government's plan. Suggestions for the village government, Bumdes administrators and the local community to be able to work more together in running this village-owned business entity, especially since there are so many village potentials on Mantehage Island in boosting the economy.

Keywords: Village Business; Village Income; Government Management; Community Economy

1. PENDAHULUAN

Pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan dapat memberikan stimulus baru dalam menggerakkan roda ekonomi desa. pemerintah mengeluarkan program melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu BUMDes sebagai salah satu program dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki.

Pulau Mantehage terdiri dari 4 desa yaitu: Desa Buhias, Desa Mantehage I Tangkasi, Desa Mantehage II Bangou, Desa Mantehage III Tinongko. Tak banyak yang tahu bahwa Pulau Mantehage merupakan salah satu pulau terluar yang di Sulawesi Utara (Sulut). Padahal pulau ini berjarak tak jauh dengan Kota Manado, ibu kota Sulut. Dari Manado menuju Mantehage hanya butuh perjalanan laut sekitar 1,5 jam melewati Pulau Bunaken dan

Manado Tua di sebelah kiri, dan Pulau Siladen di sebelah kanan. Sebelum mencapai pulau Nain, taksi air akan mengambil jalur ke kiri, menuju lokasi Dermaga Buhias, kampung terbesar di Mantehage.

Dari observasi awal peneliti, BUMDes pulau mantehage belum mendapatkan pelatihan secara profesional dalam pengelolaan BUMDes tersebut. BUMDes di Pulau Mantehage memiliki beberapa program dalam rencananya untuk mencapai tujuan yang seharusnya meningkatkan pendapatan asli desa. Namun tanpa adanya pengelolaan yang baik, bumdes di pulau mantehage masih tidak berjalan secara optimal sesuai rencana dan peraturan yang mengatur BUMDes.

Peneliti menemukan hasil pendapatan yang tidak sesuai dari tujuan pemerintah desa dalam mendirikan Bumdes di pulau mantehage pada saat melaksanakan kuliah kerja terpadu. Melalui observasi awal dalam data tersebut masih banyak pendapatan asli desa yang belum terlaksanakan dan tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Berikut data Pinjaman dan Hasil Pendapatan Asli Desa di tiga desa tersebut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Pengangguran.

Modal	Peminjam	Hasil	Bunga	PADES
Rp.40.000.000	20 Keluarga	Rp.4.100.000	-	-
Total	20 Keluarga	Rp.4.100.000	-	-
Rp.35.000.000	7 Keluarga	Rp.52.500.000	Rp.17.500.000	Rp.7.000.000
Rp.24.000.000	12 Keluarga	Rp.36.000.000	Rp.12.000.000	Rp.4.800.000
Total	19 Keluarga	Rp.88.500.000	Rp.29.000.000	Rp.11.800.000
Rp. 56.000.000	28 Keluarga	Rp.33.000.000	-	-
Rp. 4.000.000	1 Keluarga	-	-	-
Rp. 3.000.000	1 Keluarga	-	-	-
Total	30 Keluarga	Rp.33.000.000	-	-

Sumber: Bumdes Desa Buhias,Bango,Tinongko

Tabel 1 di atas menunjukkan modal, peminjam dan hasil badan usaha milik desa di desa Buhias, Bango dan Tinongko.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi di pulau mantehage sebelum dan sesudah adanya BUMDes.
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Desa (PADES) yang dihasilkan oleh BUMDes.
3. Untuk mengetahui cara pengelolaan BUMDes terhadap peningkatan ekonomi dan pendapatan asli desa di Pulau mantehage.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Desa

BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable (Nurcholis, 2011).

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan. (Sri dan Dewi, 2014).

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa dan akhirnya BUMDes dibentuk dengan

tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ridlwani, 2015).

2.2 Otonomi Daerah

Sejarah otonomi daerah dimulai dari lahirnya UU Nomor 1 tahun 1945, dalam undang-undang ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, berumur lebih kurang tiga tahun karena diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948. Selang waktu 25 tahun kemudian baru diganti dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 (pasca lengsernya rezim orde baru – era reformasi), yang kemudian melahirkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Safitri, 2016).

Sejak tahun 2000 pelaksanaan otonomi daerah mulai terealisasi secara bertahap. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah maka perimbangan keuangan sesuai UU no 25 tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri (Widodo, 2016).

Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika disahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi desa di beberapa daerah masih belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Minimnya pemahaman Kepala desa, aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengakibatkan status otonom yang dimiliki desa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meskipun telah dibarengi dengan dana desa yang cukup besar (Santoso, 2009).

2.3 Otonomi Desa

Definisi desa menurut PP No 72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Yuridis et al., 2021).

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Pamungkas, 2019).

Pelaksanaan otonomi desa di beberapa daerah masih belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Minimnya pemahaman Kepala desa, aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengakibatkan status otonom yang dimiliki desa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meskipun telah dibarengi dengan dana desa yang cukup besar (Natal, 2020).

2.4 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. (Silitonga, 2021).

Selanjutnya ketentuan penggunaan dana desa dimaksudkan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Huruf a, Bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pencapaian tujuan desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa (Dirkareshza & Sihombing, 2021).

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Wowor (2019) yang membahas tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan asli desa kamanga kecamatan tompaso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa.

Dalam penelitian Lilik (2021) yang membahas tentang pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Katon Margo Sembada Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi BUMDes Katon Margo Sembada menjadi salah satu BUMDES yang terdampak selama pandemi covid – 19. Dampak tersebut dapat dilihat dari menurunnya pendapatan sebesar 30%. Hal tersebut terjadi karena selama ini BUMDES Katon Margo Sembada, masih menggunakan metode konvensional dalam pemasarannya. Berdasarkan hasil penilaian awal (initial assessment) permasalahan, tim pengabdian sudah melakukan pendampingan dalam pembuatan website, media sosial, pendampingan dan pelatihan tata kelola media, *digital marketing dan marketplace*.

Dalam penelitian Hermansah (2019) yang membahas tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemerintah desa belum mampu secara optimal menyerap pendapatan asli desa dari pengelolaan kekayaan desa yang ada, belum adanya regulasi tentang penertiban aset desa, terutamadalah hal sewa aset desa, serta kurangnya antusiasme warga desa dalam mengembangkan potensi, setelah mendapatkan pembinaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian Mutmainnah (2020) yang berjudul membahas pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap pengembagan ekonomi desa di kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh BUMDES terhadap pengembangan ekonomi desadi Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu badan usahamilik desa (BUMDES) sedangkan variabel terikat yaitu pengembangan ekonomi desa. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukandiketahui nilai thitung sebesar 7.198 dan nilai probabilitas (sig t) sebesar 0.000 .

2.3 Kerangka Pemikiran

Model penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh penulis

Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual dari penelitian ini. Berdasarkan gambar di atas maka bisa dijelaskan bahwa, badan usaha milik desa di pulau mantehage mengguakan sitem simpan-pinjam dan mempunyai gambarna dalam memastikan tujuan dari bumdes ini di bentuk. Yaitu unutup meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa.

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil dari observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian di pulau mantehage, minahasa utara. Sumber Data primer dari hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan yang materinya berhubungan tentang Peranan Badan Milik Desa (BUMDes) Dalam perekonomian atau Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Tiga Desa Pulau Mantehage. Data sekunder data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data tersebut diperoleh penulis dari dokumen–dokumen perusahaan dan buku–buku literatur yang memberikan informasi tentang Peranan Badan Milik Desa (BUMDes) Dalam perekonomian atau Pendapatan Asli Desa (PADes) Di 3 Desa Pulau Mantehage

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui tiga tahap penelitian, (Prasanti, 2018) yaitu:

1. Observasi atau pengamatan
2. Studi kepustakaan
3. Wawancara

Metode Analisis Data

Dalam teknik ini penulis menghubungkan teori-teori yang ada dengan peranan Badan Milik Desa (BUMDes) Dalam perekonomian atau Pendapatan Asli Desa (PADes) Di 3 Desa Pulau Mantehage yang terdapat dalam sumber-sumber yang ada. Setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian penulis melakukan analisa terhadap keseluruhan data secara mendalam untuk dapat mengetahui hasil dari apa yang sedang penulis teliti. Kemudian disusun secara sistematis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penulis juga menggunakan teknik triangulasi data yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber triangulasi tehnik pengumpulan data dan waktu (Semiawan, 2010).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Setyariski, 2018).

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik berbeda (Zuldafrial, 2021).

Metode Kualitatif

Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis, dan sistemik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif-analisis yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistemik atau menyeluruh dan sistematis (Nurul, 2008).

Dalam penelitian ini akan berfokus pada: pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di pulau Mantehage, dengan menggunakan teori dari George Terry mengenai fungsi fungsi Manajemen dari 4 fungsi (Terry, 1968), peneliti menggunakan 3 fungsi yakni: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan. Jumlah Informan yang peneliti gunakan untuk menunjang penelitian ini sebanyak 3 Kelompok antara lain: Hukum Tua, Pengelola BUMDes, Masyarakat yang menggunakan jasa BUMDes.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran dan Pengelolaan Bumdes

Badan Usaha Milik Desa Buhias

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buhias didirikan pada tanggal 8 Desember 2017. Dana awal yang disediakan Rp.40.000.000. Jangka waktu setiap setoran peminjam diberikan 10 Bulan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Buhias memiliki sistem pengelolaan yaitu simpan-pinjam, adapunsisa hasil bunga pinjaman yang diberikan adalah:

1. 2% Untuk Pendapatan Asli Desa (PADES)
2. 2% Opsional Pengurus
3. 1% Alat Tulis Menulis

Badan Usaha Milik Desa Bango

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bango didirikan pada tanggal 14 Maret 2018. Danaawal yang disediakan pada tahun 2018 sebanyak Rp.60.000.000. BUMDesa Bango kembali menerima suntikan modal sebesar Rp.11.000.000. Jangka waktu setiap setoran peminjam diberikan 10 Bulan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bango memiliki sistem pengelolaan bango yaitu simpan pinjam, adapun sisa hasil bunga pinjaman yang diberikan adalah:

1. 2% Untuk Pendapatan Asli Desa (PADES)
2. 2% Opsional Pengurus
3. 1% Alat Tulis Menulis

Badan Usaha Milik Desa Tinongko

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tinongko didirikan pada tanggal 6 Januari 2019. Dana awal yang disediakan pada tahun 2019 sebanyak Rp.75.000.000. Dan belum ada suntikan dana setelahnya. Jangka waktu setiap setoran peminjam diberikan 10 Bulan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tinongko memiliki sistem pengelolaan simpan pinjam, adapun sisa hasil bunga pinjaman yang diberikan adalah:

1. 2% Untuk Pendapatan Asli Desa (PADES)
2. 2% Opsional Pengurus
3. 1% Alat Tulis Menulis

4.2 Pekerjaan dan Penghasilan Pelaku Bumdes

Berikut nama-nama pelaku, pekerjaan dan penghasilan sebelum dan sesudah adanya badanusaha milik desa (Bumdes

Desa Mantehage Buhias

Berikut nama pelaku bumdes Mantehage Buhias, pekerjaan dan penghasilan sebelum dan sesudah dibentuknya badan usaha milik desa.

Tabel 2 Pekerjaan dan Penghasilan Pelaku Bumdes Buhias

No	Nama	Pekerjaan	Penghasilan Sebelum Bumdes	Penghasilan Sesudah Bumdes	No	Nama	Pekerjaan	Penghasilan Sebelum Bumdes	Penghasilan Sesudah Bumdes
1	Neyti Katedu	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	11	Younce Tumandung	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000
2	Santi Smombo	Tukang	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000	12	Jois salam	Wirausaha	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
3	Nova Timbowo	Tukang	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	13	Fermi Madi	Nelayan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
4	Debi Mahanap	Tukang	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	14	Onver Jois Tumandung	Tukang	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
5	Enggelina Beret	Nelayan	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	15	Agustinu Iononaung	Peternak	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
6	Osman Sumombo	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000	16	Irene Tumandung	Wirausaha	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
7	Sherli Manalip	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000	17	Abigael Moses	Wirausaha	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
8	Sariji Kunteung	Petani	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	18	Linda Sulung	Peternak	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
9	Memi Manangwela	Petani	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	19	Feki tumandung	Tukang	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
10	Berneta kunteeung	Tukang	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	20	Stevanus Panese	Wirausha	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

Sumber: Hasil Wawancara

Desa Mantehage II Bango

Berikut nama pelaku bumdes Mantehage II Bango, pekerjaan dan penghasilan sebelum dan sesudah dibentuknya badan usaha milik desa.

Tabel 3 Pekerjaan dan Penghasilan Pelaku Bumdes Bango

No	Nama	Pekerjaan	Penghasilan Sebelum Bumdes	Penghasilan Sesudah Bumdes	No	Nama	Pekerjaan	Penghasilan Sebelum Bumdes	Penghasilan Sesudah Bumdes
1	Imelda Tahulending	Wirausaha	Rp. 2.000.000/Bln	Rp. 2.000.000/Bln	11	Trifona Bermalam	Peternak	Rp. 3.000.000/Bln	Rp. 3.000.000/Bln
2	Yulce Tompoh	Wirausaha	Rp. 1.000.000/Bln	Rp. 1.000.000/Bln	12	Alinece Bawingki	Peternak	Rp. 3.000.000/Bln	Rp. 3.000.000/Bln
3	Delta Takaonselang	Wirausaha	Rp. 1.000.000/Bln	Rp. 1.000.000/Bln	13	Yeti Ria	Peternak	Rp. 2.500.000/Bln	Rp. 2.500.000/Bln
4	Pince Haribae	Wirausaha	Rp. 1.000.000/Bln	Rp. 1.000.000/Bln	14	Margaretha Hawindha	Nelayan	Rp. 1.000.000/Bln	Rp. 1.000.000/Bln
5	Yulin Lusunaung	Petani	Rp. 2.000.000/Bln	Rp. 2.000.000/Bln	15	Elvi Adrey	Nelayan	Rp. 1.500.000/Bln	Rp. 1.500.000/Bln
6	Yulita Luas	Petani	Rp. 2.500.000/Bln	Rp. 2.500.000/Bln	16	Marina Sasuang	Nelayan	Rp. 1.000.000/Bln	Rp. 1.000.000/Bln
7	Maya Bakunusa	Petani	Rp. 2.000.000/Bln	Rp. 2.000.000/Bln	17	Silce Takaonselang	Nelayan	Rp. 1.000.000/Bln	Rp. 1.000.000/Bln
8	Femi Ampahai	Petani	Rp. 1.500.000/Bln	Rp. 2.000.000/Bln	18	Cendraati Dolong	Nelayan	Rp. 1.000.000/Bln	Rp. 1.000.000/Bln
9	Elisabet Bakusnusa	Petani	Rp. 1.000.000/Bln	Rp. 2.000.000/Bln	19	Irma Bermalam	Nelayan	Rp. 1.500.000/Bln	Rp. 1.500.000/Bln
10	Paulina Saladi	Peternak	Rp. 2.000.000/Bln	Rp. 2.000.000/Bln					

Sumber: Hasil Wawancara

Desa Mantehage III Tinongko

Berikut nama pelaku bumdes Mantehage III Tinongko, pekerjaan dan penghasilan sebelum dan sesudah dibentuknya badan usaha milik desa.

Tabel 4 Pekerjaan dan Penghasilan Pelaku Bumdes Tinongko

No	Nama	Pekerjaan	Penghasilan Sebelum Bumdes	Penghasilan Sesudah Bumdes	No	Nama	Pekerjaan	Penghasilan Sebelum Bumdes	Penghasilan Sesudah Bumdes
1	Ratina Raton	Wirausaha	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	16	Natalia Lindia	Peternak	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
2	Adolfina B	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	17	Dika Lalaeng	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000
3	Selfi Tahulade	Nelayan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	18	Friska Sale	Tukang	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
4	Marce Pohonsili	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	19	Polce Deki	Tukang	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5	Tresia Mahede	Wirausaha	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	20	Edwin Pontoh	Petani	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
6	Sandra Habani	Wirausaha	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000	21	Ferni Deki	Peternak	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
7	Ferdinan Kalampu	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	22	Elfina Marli	Nelayan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
8	Yul Adrian	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	23	Novi Balaati	Wirausaha	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
9	Yohana Ambui	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	24	Ruske Sabentar	Petani	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
10	Meike Pilat	Nelayan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	25	Susanti Passa	Petani	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
11	Hengki Pilat	Wirausaha	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	26	Kartini bakunusa	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000
12	Rut Tatibas	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	27	Youke Butulo	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
13	Monalisa Panetik	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	28	Miske Sebentr	Peternak	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
14	Elmi Adrian	Tukang	Rp. 3.000.000	Rp. 3.500.000	29	Yan Yulius	Petani	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
15	Nofke Lengkeong	Nelayan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	30	Debi Harun	Nelayan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000

Sumber: Hasil Wawancara

4.3 Jumlah Pinjaman dan Tujuan Pinjaman

Berikut tabel dan grafik pinjaman yang di pinjam oleh pelaku badan usaha milik desa di tiga desa (Buhias, Bango, Tinongko). dan jumlah setoran yang harus dibayar oleh peminjam

Desa Mantehage Buhias

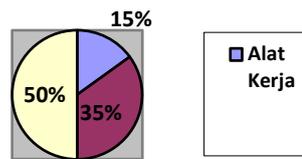
Tabel 5 Pinjman Desa Buhias

Peminjam	Jumlah Pinjaman	Setoran/Bln
20 Keluarga	Rp.2.000.000	300.000/Bln

Sumber: Bumdes Buhias

Tabel 5 Menunjukkan total keluarga meminjam, jumlah yang di pinjam dan setoran yang diberikan tiap bulan ke badan usaha milik desa buhias

Gambar 2 Grafik Tujuan Pinjaman desa Buhias



Sumber: Diolah Oleh Penulis

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa ada beberapa tujuan masyarakat meminjam dana. Seperti alat kerja, modal usaha dan kebutuhan rumah tangga, dari 20 Keluarga yang meminjam dana 3 Keluarga (15%) untuk Alat Kerja, 7 Keluarga (35%) untuk Modal Usaha dan 10 Keluarga (50%) untuk Kebutuhan Rumah Tangga. Berikut adalah grafik peminjaman modal masyarakat buhias.

Desa Mantehage Bango

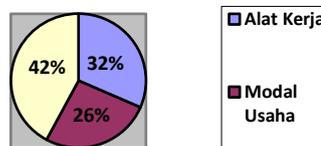
Tabel 6 Pinjaman Desa Bango

Peminjam	Jumlah Pinjaman	Setoran/Bln
12 Keluarga	Rp.2.000.000	300.000/Bln
7 Keluarga	Rp.5.000.000	750.000/Bln

Sumber: Bumdes Bango

Tabel 6 Menunjukkan total keluarga meminjam, jumlah yang di pinjam dan setoran yang diberikan tiap bulan ke badan usaha milik desa Bango

Gambar 3 Grafik Tujuan Pinjaman desa Bango



Sumber: Diolah Oleh Penulis

Dari Grafik di atas menunjukkan bahwa ada beberapa tujuan masyarakat meminjam dana. Seperti alat kerja, modal usaha dan kebutuhan rumah tangga, dari 19 Keluarga yang meminjam dana 6 Keluarga(32%) untuk Alat Kerja, 5 Keluarga (26%) untuk Modal Usaha dan 8 Keluarga (42%) untuk KebutuhanRumah Tangga. Berikut adalah grafik peminjaman modal masyarakat bango.

Desa Mantehage Bango

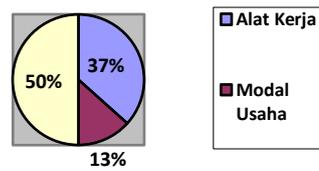
Tabel 7 Pinjaman Desa Tinongko

Peminjam	Jumlah Pinjaman	Setoran/Bln
28 Keluarga	Rp.2.000.000	300.000/Bln
1 Keluarga	Rp.3.000.000	450.000/Bln
1 Keluarga	Rp.4.000.000	600.000/Bln

Sumber: Bumdes Tinongko

Tabel 7 Menunjukkan total keluarga meminjam, jumlah yang di pinjam dan setoran yang diberikan tiap bulan ke badan usaha milik desa.

Gambar 3 Grafik Tujuan Pinjaman desa Bango



Sumber: Diolah Oleh Penulis

Dari data di atas menunjukkan bahwa ada beberapa tujuan masyarakat meminjam dana. Seperti alat kerja, modal usaha dan kebutuhan rumah tangga, dari 30 Keluarga yang meminjam dana 11 Keluarga (37%) untuk Alat Kerja, 4 Keluarga (13%) untuk Modal Usaha dan 15 Keluarga (50%) untuk Kebutuhan Rumah Tangga. Berikut adalah grafik peminjaman modal masyarakat Tinongko.

4.4 Modal Dan Pendapatan

Berikut Modal dan pendapatan Asli desa (Pades) di tiga desa pulau mantehage dari awal dibentuk sampai saat ini.

Tabel 8 Data Pades Desa Buhias

Modal	Peminjam	Hasil	Bunga	PADES
Rp.40.000.000	20 Keluarga	Rp.4.100.000	-	-
Total	20 Keluarga	Rp.4.100.000	-	-

Sumber: Bumdes Desa Buhias

Berdasarkan table diatas yang kita lihat bahwa modal yang dikeluarkan oleh pemerintah desa buhias yaitu Rp.40.000.000 dan Pendapatan asli desa buhias Rp.0

Tabel 9 Data Pades Desa Bango

Modal	Peminjam	Hasil	Bunga	PADES
Rp.35.000.000	7 Keluarga	Rp.52.500.000	Rp.17.500.000	Rp.7.000.000
Rp.24.000.000	12 Keluarga	Rp.36.000.000	Rp.12.000.000	Rp.4.800.000
Total	19 Keluarga	Rp.88.500.000	Rp.29.000.000	Rp.11.800.000

Sumber: Bumdes Desa Bango

Berdasarkan table diatas yang kita lihat bahwa modal yang dikeluarkan oleh pemerintah desa buhias yaitu Rp.59.000.000 dan Pendapatan asli desa buhias Rp.11.800.000

Tabel 10 Data Pades Desa Tinongko

Modal	Peminjam	Hasil	Bunga	PADES
Rp. 56.000.000	28 Keluarga	Rp.33.000.000	-	-
Rp. 4.000.000	1 Keluarga	-	-	-
Rp. 3.000.000	1 Keluarga	-	-	-
Total	30 Keluarga	Rp.33.000.000	-	-

Sumber: Bumdes Desa Tinongko

Berdasarkan table diatas yang kita lihat bahwa modal yang dikeluarkan oleh pemerintah desa buhias yaitu Rp.63.000.000 dan Pendapatan asli desa buhias Rp.0

4.5 Hasil Wawancara

Bumdes di pulau mantehage sebenarnya memiliki peran besar untuk mendongkrak perekonomian di mantehage, contohnya budes di desa bango. Bumdes didesa bango seharusnya menjadicontoh buat bumdes di kecamatan wori. Karena pengelolaan secara baik bagi pengurus yang ada di desa bango bumdes ini bisa dikatakan berjalan dengan lancar, namun desa-desa lain yang ada di pulaumantehage malah tidak berjalan begitu lancar karena kurangnya pengetahuan dan pengelolaan dari pengurus bumdes, seperti desa Buhias dan desa Tinongko.

Berikut beberapa wawancara kepala desa, pengngurus bumdes dan masyarakat terkait. “Bumdes sebenarnya sangat bagus dan sangat membantu dalam potensi desa akan tetapi buruknya pengelolaan bumdes ini sampai potensi besar yang ada dalam desa belum bisa dilakukan secara maksimal, sejujurnya saya adalah orang kedua yang menangani bumdes ini, karena susah nya partisipasi masyarakat dalam memberi kewajiban, sampai ketua yang sebelumnya belum mampu menangani bumdes ini, namun saya harapkan saya bisa merubah sistem yang telah dilakukan dan saya akan berusaha, pendapatan asli desa buhias bisa berjalan dengan keadaan baik”

4.6 Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas bumdes di pulau mantehage belum berjalan begitu baik, Di dalam buku Panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2007 dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes. Dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDes salah satunya tidak dalam bentuk koperasi (Simpan-Pinjam), dari kegiatan itu sudah bisa kita lihat bahwa bumdes di pulau mantehage sangat beresiko.

Desa Buhias Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buhias mengeluarkan dana awal Rp.40.000.000. sampai saat ini belum ada hasil untuk pendapatan asli desa, Padahal bundes desa buhis sudah didirikan sejak 2018. Berbeda dengan desa buhias Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bango mengeluarkan dana awal sebanyak Rp.60.000.000. BUMDes Bango kembali menerima suntikan modal sebesar Rp.11.000.000. Saat ini bumdes bango sudah mengeluarkan dana Rp 59.000.000 dan sudah mendapatkan pendapatan asli desa dengan jumlah Rp.11.800.000 namun masih terbilang cukup lamban karena bumde ini sudah di bentuk dari tahun 2018. Yang terakhir ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tinongko dana awal yang disediakan pada tahun 2019 sebanyak Rp.75.000.000. Dan belum ada suntikan dan setelahnya. Bumdes tinongko mengeluarkan Rp 63.000.00 dalam tahap pertama, Dan sekarang penggurus sudah mencairkan Tahap kedua sebesar Rp.45.000.000 akan tetapi belum ada pendapatan asli desa yang diberikan.

Dari hasil yang kita lihat bahwa Bumdes di pulau mantehage masih banyak kekurangan dan tidak berjalan dengan begitu baik, masih banyak kekurangan dalam pengelolaan pemerintah dan masyarakat sekitar. Sebenarnya rancangan pemerintah desa sudah jelas dan jika dijalankan dengan baik bisa menghasilkan pendapatan asli desa, namun cara pengelolanya yang masih belum berjalan baik pendapatan asli desa masih sangat kurang dan tidak menghasilkan apa-apa, yang harusnya dana yang diberikan bisa jadi modal usaha akan tetapi masih ada masyarakat yang salah menggunakannya.

Dalam penelitian Alfirdausi (2019) yang membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Bumdes Tirta Mandiri Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten) Penelitian ini menggunakan studi pendekatan campuran yang mengaitkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tahapan pendirian BUMDes, strategi dalam pengelolaan BUMDes, dan manfaat BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pendekatan kuantitatif akan menjelaskan peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

5. PENUTUP.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, skripsi ini membahas peranan badan usaha milik desa (bumdes) dalam meningkatkan ekonomi dan pendapatan asli desa (pades) di pulau mantehage. Dari hasil Penelitian di atas dengan mewawancarai pelaku-pelaku terkait dalam badan usaha milik desa dan ada beberapa masyarakat yang menjawab terkait pendapatan sebelum dan sesudah adanya bumdes, dan ternyata dari jawaban masyarakat rata-rata pendapatan mereka tidak ada pengaruh dengan berjalanya badan usaha milik desa, dari besaran pendapatan perbulan saja tetap sama dan tidak ada perubahan drastis.

Hasil dari data-data badan usaha milik desa di tiga desa tentang beberapa modal yang telah di keluarkan pemerintah dalam APBDes untuk mengelola bumdes dan menghasilkan pendapatan asli desa, namun dari tiga desa (Buhias,Bango,Tinongko) hanya desa bango lah yang menghasilkan pendapatan asli desa sebesar

Rp.11.800.000 hanya sekali dalam beberapa tahun, dan dua desa masih belum memiliki hasil apapun dan mengalami kerugian.

Penelitian di atas dapat diketahui bahwa cara pemerintah desa mengelola badan usaha milik desa di pulau mantehage dengan kegiatan simpan-pinjam, yang sangat jelas tidak relevan untuk dilakukan dalam kegiatan bumdes, cara pengelolaan yang meminjamkan uang ke masyarakat dengan pengembalian bunga 5% sangat beresiko dikrenakan bumdes ini berjalan layaknya koperasi dan kita juga sadar akan partisipasi masyarakat dalam mengembalikan kewajiban sangat beresiko tinggi dan bisa mengalami kerugian.

Saran kepada pemerintah desa yang ada di pulau mantehage untuk lebih mengutamakan dan mengsosialisasikan ke masyarakat seberapa penting badan usaha milik desa ini agar pendapatan asli desa bisa dihasilkan dan badan usaha milik desa tersebut bisa mendapatkan penambahan dana dari pemerintah kabupaten.

Saran kepada pengurus bumdes yang ada di masing-masing desa untuk bisa membuat kegiatan usaha lain selain simpan-pinjam agar pengurus pun tidak merasa sulit untuk menjalankan badan usaha milik desa ini, dan sangat di sayangkan jika bumdes di pulau mantehage masih seperti kegiatan koperasi dan arahkan masyarakat dalam memanfaatkan uang pinjaman untuk modal usaha bukan untuk kebutuhan secara tiba-tiba.

Saran kepada masyarakat desa untuk lebih mengutamakan kewajiban sebagai pelaku usaha bumdes, di sisi lain bumdes juga berdiri dengan persetujuan masyarakat dalam musyawarah desa jadi masyarakat juga harusnya bekerja sama dengan pengurus dan pemerintah desa dalam menjalankan badan usaha milik desa, bumdes di desa lain pun berjalan dengan baik karena dukungan masyarakat desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdausi, A. A., & Riyanto, G. (2019). The Role Of Village Owned Enterprises (Bumdes) On Efforts To Increase Original Village Income (Pades) And Village Community Welfare (Case Study On Tirta Mandiri Bumdes In Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency). *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 4(2), 64–71.
- Dirkareshza, R., & Sihombing, E. N. (2021). Acceleration of Village Welfare through Bumdes: Disorientation of Implementation of Bumdes Regulations and Policies. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 419. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.419-434>
- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(1), 19–39. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>
- Hermansah, N., Nurulsyam, A., & Siswadi, E. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis. *Nana*, 5, 288–293.
- Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf, & Ayudia Sokarina. (2021). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 296–303. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i4.1127>
- Mutmainnah. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Mutmainnah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.

- Natal, K. M. (2020). Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang. *Jurnal Um-Taspel* 4, 44–54.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. ERLANGGA.
- Nurul, & Z. (2008). *Pendidikan Moral dan Budi pekerti dalam Prespektif Perubahan Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstua dan Futuristik*. Bumi Aksara.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(9), 79–83. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278>
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6, 413–425. <http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/361/334>
- Semiawan. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Grasindo.
- Sri, A., & Dewi, K. (2014). *Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. *Jurnal Universitas Sebelas Maret* V(1), 1–14.
- Terry, G. R. (1968). *Principles of management*. Illinois : Ricard D. Irwin.
- Widodo, A. (2016). Jurnal Revitalisasi Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 5, Nomor 4, Desember 2016. *Core.Ac.Uk*, 5(September), 23–31. <https://core.ac.uk/download/pdf/229209583.pdf>
- Wowor, M. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompas. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–11.
- Yuridis, T., Kerjasama,. (2021). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangkapercepatan Pembangunan Desa londa*. *Umsu Repository*, 2-8
- Zuldafrial. (2021). *Mengungkap Dampak Coivd-19 Pada Pelaku UMKM Kuliner (Studi Kasus: UMKM Kuliner Di Wilayah Rawamangun)*. 20–30. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/4853>